

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SAWAHLUNTO  
MARET 2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun mendatang.

Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi aparatur pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Sawahlunto,   Maret 2018

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 SISTEMATIKA RENCANA KERJA .....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU ..</b>	<b>6</b>
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD .....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD.....	16
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.....	18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD.....	32
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

Daftar Tabel

Hal

Tabel 1	Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	8
Tabel 1.2	Capaian sasaran strategis dan indikator sasaran	15
Tabel 2	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	18
Tabel 2.3	Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
Tabel 3	Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan tahun 2019	22
Tabel 3.1	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	25
Tabel 4	Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	34



## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja – OPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) Tahun 2019 memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas untuk mencapai sasaran yang diinginkan pada tahun 2019. Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realitis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

### 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013.
13. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK.



19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk non Permanen.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk periode 1 tahun

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

### 1.4. SISTEMATIKA RENCANA KERJA

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahu Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mencakup uraian dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, serta kemajuan yang telah dicapai atas target kinerja yang diharapkan menurut Renstra masing-masing OPD, mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan pada Rencana Kerja Tahun 2019

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memaparkan kajian capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dalam SPM, PP No. 6 tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat penjelasan terhadap permasalahan aktual / penting yang dihadapi masyarakat sesuai kewenangan OPD masing-masing, beserta dampak dan peluang yang dimiliki OPD serta rekomendasi kebijakan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan keterkaitan antara Rancangan Awal<sup>9</sup> RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta temuan dan catatan penting, termasuk perubahan atau penyesuaian yang dilakukan.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Memaparkan kajian penyusunan Renja dengan usulan-usulan desa/kelurahan, kecamatan, OPD lain maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan bidang Dukcapil yang disampaikan melalui forum OPD.

## BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Menyajikan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi OPD.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.



### 3.3. Program dan Kegiatan

Termasuk didalamnya penjelasan mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik yang sesuai dengan target, melebihi target maupun yang tidak sesuai dengan target.

## BAB IV Penutup

Berisikan catatan penting penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja OPD

serta tindak lanjutnya.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

---

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan OPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra mencakup uraian dan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun lalu dengan renstra masing-masing OPD.

Dari 6 program yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2017, secara fisik 5 program terlaksana 100%, sedangkan yang 2 program lagi tidak dilaksanakan karena dihilangkan pada perubahan APBD tahun 2017. Selanjutnya, ditinjau dari sisi kegiatan maka dari total 31 kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tahun 2017, 28 diantaranya mencapai realisasi 100% sedangkan 3 kegiatan lainnya tidak terealisasi karena dihilangkan pada perubahan APBD tahun 2017.

Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK, adanya inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pelayanan serta adanya kontrol yang baik dari pimpinan. Sedangkan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu :

1. Pada program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar internasional (9001-2018).  
(program dan kegiatan dihilangkan di perubahan APBD 2017)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Rehab sedang/berat gedung kantor
  - b. Pengadaan alat angkut darat bermotor.

(hanya kegiatan yang dihilangkan di perubahan APBD 2017)

Sementara dilihat dari realisasi keuangan, capaian program secara total sebesar 92,99% dengan rincian pada belanja tidak langsung terealisasi sebesar 92,29% dan pada belanja langsung terealisasi sebesar 93,74% dengan kisaran rata-rata capaian per program antara 88,93% sampai dengan 97,66% dan capaian kegiatan rata-rata berkisar antara 53,97% sampai 99,86%.



Secara keuangan, program tidak seluruhnya terealisasi hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Kegiatan Dekorasi tidak terealisasi karena anggaran promosi melalui Radio kegiatannya dialihkan menggunakan dana DAK Non Fisik.
2. Tidak banyak terjadi kerusakan pada peralatan kantor sehingga biaya pemeliharaan yang terpakai relative sedikit.

Rincian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2017 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO**

No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	12
<b>SEKRETARIAT</b>											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan terhadap administrasi perkantoran		100%	12	12	100%	12	12	100.00%	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jml materai 6000 yg disediakan	1,980	2,925	300	220	73.33%	400	3,545	179.04%	
		Jml materai 3000 yg disediakan	2,550	600	500	250	50.00%	220	1,070	41.96%	
		Jml pegawai yg dibayarkan jasanya (org)	1	1	1	1	100.00%	-	2	200.00%	
		Jml pemakaian jasa pos (Tahun)	60	23	12	11	91.67%	12	46	76.67%	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jml. Tagihan listrik, air, telepon dan internet yang dibayarkan (bulan)	60	24	12	12	100.00%	12	48	80.00%	
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	bahan dan alat kebersihan (Tah.jn)	60	24	12	12	100.00%	12	48	80.00%	
		jumlah petugas kebersihan dan penjaga kantor yang dibayarkan gajinya (orang)	4	4	3	3	100.00%	-	-	0.00%	Tahun 2018 Honorarium pindah ke Perencanaan Dinas Dalam Daerah
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Jml ATK yang dibeli (bulan)	60	20	12	12	100.00%	12	44	366.67%	
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jml. Barang cetakan, jilid dan foto copy yang disediakan (bulan)	60	23	12	10	83.33%	12	45	375.00%	



No Kode Unsur	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja program dan kegiatan tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jml. Komponen alat listrik yang dibeli (bulan)	60	20	12	12	100.00%	12	44	366.67%	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan (jenis)	3	15	3	3	100.00%	3	21	700.00%	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat (bulan)	55	21	11	11	100.00%	11	43	390.91%	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jml. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60	12	12	12	100.00%	12	36	300.00%	
10	Penyediaan jasa pelayanan pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan Jasanya (orang)	5	12	7	7	100.00%	6	25	500.00%	
11	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah pegawai yang dibayarkan Jasanya (orang)	14	14	12	12	100.00%	14	40	285.71%	
12	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Jumlah spanduk, yang disediakan (bh)	70	17	10	-	0.00%	14	31	221.43%	
		Jumlah bendera yang disediakan (bh)	-	2	2	2	100.00%	1	5	500.00%	
		Jumlah karangan bunga yang disediakan (bh)	-	5	6	-	0.00%	10	15	150.00%	
		Bezetting	-	-	1	-	0.00%	1	1	100.00%	
		Jml baliho yang dibuat (m <sup>2</sup> )	-	-	33	33	100.00%	33	66	200.00%	
		Papan informasi acrylic	-	-	1	1	100.00%	1	2	200.00%	
		Standing Banner	-	-	1	-	0.00%	1	1	100.00%	



No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Jml. iklan radio yg disiarkan (kali)	15	1	1	-	0,00%	3	4	26,67%	
2	Program Peningkatan Sarana	tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	-	100,00%	12	12	100,00%	
	1 Pengadaan Peralatan gedung kantor	jumlah printer yang dibeli (unit)	5	6	3	-	0,00%	1	7	140,00%	
		jml. Mesin sidik jari yg dibeli (unit)	1	1	1	-	0,00%	1	2	200,00%	
		jumlah AC yang dibeli (unit)	6	2	1	1	100,00%	-	*3	50,00%	
		jumlah filing kabinet yg dibeli (unit)	5	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
		jml sound system rapat yg dibeli (unit)	1	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
		jml layar/proyektor yg dibeli (unit)	1	-	1	1	100,00%	-	1	100,00%	
		jumlah laptop yang dibeli (unit)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%	
		jml meja pelayanan yg dibeli (bh)	1	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
		jumlah kursi layanan yg dibeli (bh)	5	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
		jumlah kursi roda yang dibeli (bh)	1	-	-	-	0,00%	1	-	0,00%	diusulkan di tahun 2018
		jumlah kursi staf yg dibeli (bh)	20	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	diusulkan di tahun 2017 dan 2018
		jumlah cctv yang dibeli	1	-	1	1	100,00%	1	2	200,00%	
		jumlah Genset yang dibeli	2	1	1	1	100,00%	-	2	100,00%	diusulkan tahun 2016 dan 2017
		jumlah televisi yang dibeli	1	1	-	-	0,00%	-	1	100,00%	diusulkan tahun 2016 krn penambahan ruangan pelayanan
		jumlah komputer yg dibeli (bh)	2	4	-	-	0,00%	-	4	200,00%	
		jmlh meja komputer SIAK yg dibeli (bh)	1	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
		jmlh meja staf yg dibeli (bh)	3	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	



No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		jumlah mesin faximile yg dibeli (bh)	1	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		jumlah aiphone yg dibeli (bh)	7	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		jml server+digital cabinet+scanner+lainnya (paket)	1	-	1	1	100.00%	-	1	100.00%	
		peralatan rekam data (paket)	1	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		jumlah mesin tik yang dibeli (bh)	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		jumlah televisi yang dibeli	-	-	-	-	0.00%	1	1	100%	
2	Belanja Modal Pengadaan Mobil keliling	Jumlah mobil layanan keliling yang dibeli (unit)	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		Jml. Interior mobil layanan yg disediakan (paket)	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
		Jml. Mobiler mobil layanan yg di beli (bh)	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah frekwensi pemeliharaan gedung kantor (bulan)	60	12	12	12	100.00%	12	36	60.00%	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jml. Kendaraan dinas roda 4 yg dipelihara	28	5	5	5	100.00%	5	15	53.57%	
		Jml. Kendaraan dinas roda 2 yg dipelihara	42	9	12	9	75.00%	9	27	64.29%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	57	10	9	5	55.56%	12	27	47.37%	
6	Pemeliharaan rutin/berkala mobil	Jumlah mobil yang dipelihara (jenis)	23	3	2	2	100.00%	5	10	47.37%	

No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target <sup>1</sup> kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
7	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (paket)	1	1	-	-	0.00%	-	1	100.00%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	112	39.13	40.18%	120.00%	60.00%	45.00%	41	9062.22%	
	1 Pendidikan dan latihan formal	Jml aparatur yang telah mengikuti diklat formal, umum dan teknis (org)	60	30	20	12	60.00%	30	72	120.00%	
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00	100.00	
	1 Fasilitasi Petugas Registrasi Dukcapil Desa/Kel.	Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)	98%	98.56	98%	98.00%	100.00%	97%	100.51	103.62	
		Jumlah petugas yang dibina (orang)	50	46	46	46	100.00%	19	46	92.00%	
2	Operasi SIAC On Line	Jumlah data kependudukan yang terentri ke SIAC	50,000	64,666	3,000	6,766	225.53%	3,000	74,432	148.86%	kegiatan dihilangkan tahun 2017
		Jumlah perekaman KTP elektronik	24,000	44,394	1,800	5,472	304.00%	5,000	54,866	228.61%	
		Jumlah pelayanan lainnya	2,500	1,414	700	629	0.00%				
3	Penataan Arsip dan Pengendalian Blanko Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang tertata	50,000	11,963	5,500	6,766	123.02%	10,000	28,729	57.46%	
		Jumlah blanko yang disediakan	40,000	6,223	-	-	-	10,000	16,223	40.56%	
4	Pengelolaan SIAC	Jumlah profil yang dicetak	1	1	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Kegiatan mulai dilaksanakan tahun 2017
		Jumlah buku data agregat yg dicetak	1	1	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
		pemeliharaan peralatan SIAC	7	7	7	7	100.00%	7	7	100.00%	



No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan KTP Jumlah pelayanan KK Jumlah pelayanan lainnya	5,200 25,000 2,600	4,735 6,525 703	2,000 2,500 700	5,472 5,969 629	273.60% 238.76% 89.86%	1,000 5,000 500	11,207 17,494 1,832	215.52% 69.98% 70.46%	
6	Penilaian Petugas Registrasi desa/kel dan kecamatan	Jumlah petugas registrasi yang dinilai	10	-	-	-	-	37	37	100.00%	kegiatan ditiadakan tahun 2016
7	Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan Adminduk	Dikutinnya rapat kerja nasional dan bimtek Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (orang)	30	-	15	18	120.00%	15	30	200.00%	kegiatan ini dimulai tahun 2017
8	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Tersedianya formulir dan blanko kependudukan (paket)	2	-	1	1	100.00%	1	2	200.00%	kegiatan ini dimulai tahun 2017
9	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk	Jumlah buku yang diterbitkan (Dokumen)	5	2	-	-	-	-	-	-	diganti kegiatan Pengelolaan SIAK
10	Pelayanan Kelling Administrasi Kependudukan (diganti) Menjadi Pelayanan Dokumen Kependudukan	Frekwensi Pelayanan	161	74	30	30	100%	20	124	77.02%	Kegiatan digabung ke Pelayanan dokumen Kependudukan
5	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Penduduk (0 - 18) tahun yang memiliki akta kelahiran Penerbitan akta kematian	95% 75%	77.75% 22.70%	86% 45%	88.81% 86.38%	103.27% 191.96%	85.0% 65.0%	90.00% 3.50%	105.88% 5.38%	

No Kode Urusan	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan (sesuai Renstra)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program 2017 (tahun n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018 (n-1)		Keterangan
					Target	Realisasi	tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(5+7+9)*	11-(10/4)*	12
	1	Penataan berkas dan arsip penerbitan akta pencatatan sipil	Jumlah penataan arsip (berkas)	9,500	3,600	3,699	102.75%	2,000	7,997	105.26%	dihilangkan ditahun 2018
				2	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
				8500	2,000	3,686	184.30%	3,000	10,117	119.02%	
				25	9	9	100%		3,440	137.60	dihilangkan di tahun
	2	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Jml produk dokumen yg dlurus (dokumen)	3,431	-	-	0%	1,700	1,700	20.00%	dihilangkan di tahun 2018
			Jumlah penerbitan akta (dokumen)	3,431	-	-	0%				
	3	Penyuluhan administrasi pencatatan sipil (diganti nama menjadi Sosialisasi Kebijakan Adminduk)	Frekwensi penyuluhan (kali)	4	34	34	100%	10	48	92.31%	
			Pengadaan alat promosi (jenis)	-	1	1	100%	1	2	100.00%	



Terhadap Renstra SKPD, maka dari sasaran 6 strategis dan 8 indikator sasaran yang dilaksanakan di tahun 2017, semuanya tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kegiatan tambahan yang dilakukan diantaranya kegiatan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan di 30 desa/kelurahan dengan lama waktu pelaksanaan per desa/kelurahan 5 hari dengan rincian 21 hari kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan 4 hari pelayanan semua dokumen kependudukan. Untuk indikator sasaran Tersedianya Dokumen SOP Yang Berstandar ISO 9001-2015 akan dilaksanakan di tahun 2018. Rincian target dan realisasi capaian sasaran strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2  
Capaian Sasaran Stratis dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Tersedianya Standar Pelayanan				-
		Tersedianya Dokumen SOP Yang Berstandar ISO 9001-2015	-	-	-
2.	Meningkatnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)				149,75
		Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	100%	100%	100.00
		Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP	97%	96.52%	99.51
3.	Meningkatnya kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian				188,37
		Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	85%	94.73%	111.45
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	65%	100%	153.85
4	Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan				102,28
		Jumlah KK yang telah dimutakhiran datanya	3600	3682	102.28
5	Berkurangnya jumlah data ganda dan anomali (diragukan)				168,08
		Jumlah data ganda	5000	5833	116.66
		Jumlah data anomali	600	629	104.83
6	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan				100,00
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	5	5	100.00

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Jenis pelayanan yang harus diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 59 meliputi dokumen kependudukan yang terdiri dari:

- a. Biodata Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Tanda Penduduk
- d. Surat Keterangan Kependudukan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Kementrian Dalam Negeri sub bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 indikator utama yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik yaitu cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP, cakupan penerbitan akte kelahiran dan cakupan penerbitan akte kematian.

Kinerja pelayanan pada tahun 2017 untuk cakupan penerbitan KK = 100%, cakupan penerbitan KTP = 96,52%, cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran = 94,73% dan cakupan penerbitan akte kematian = 100% (dari jumlah kematian yang dilaporkan pada tahun 2017).

Pada indikator cakupan penerbitan KK target dapat tercapai dikarenakan hampir semua keluarga telah melakukan pengurusan KK melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto termasuk diantaranya keluarga yang baru datang dari kabupaten/kota lain.

Indikator cakupan penerbitan KTP tercapai sebesar 96,52%, dikarenakan penduduk wajib KTP berada diluar kota Sawahlunto (kuliah dan bekerja) walaupun sudah dilaksanakannya pemanggilan melalui undangan resmi by name by address oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk melaksanakan perekaman dan pencetakan KTP dengan melibatkan petugas Registrasi yang ada di desa dan Kelurahan.

Pencapaian indikator cakupan penerbitan akte kelahiran sebesar 94,73% salah satunya disebabkan oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pencatatan peristiwa penting



termasuk akte kelahiran sudah dapat dilaksanakan di tempat domisili penduduk sehingga memudahkan pengurusan akte kelahiran.

Disamping itu kegiatan pelayanan keliling ke seluruh desa/kelurahan, sangat membantu percepatan penerbitan akta kelahiran khususnya untuk anak usia 0-18 tahun.

Untuk indikator cakupan penerbitan akte kematian, tahun ini tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. Pencapaian ini didukung oleh adanya aturan baru yang mengamanatkan bahwa stelsel aktif pengurusan dokumen kependudukan yang semula berada di tangan masyarakat menjadi berada di tangan pemerintah sebagai bentuk cerminan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, dengan kebijakan dimana setiap terjadi perubahan data penduduk baik pada KK maupun KTP yang disebabkan oleh perubahan status penduduk terutama karena meninggal, maka desa/kelurahan wajib membuatkan surat keterangan kematian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mengeluarkan Akta Kematian Penduduk yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah 2013-2018, maka kinerja pelayanan yang diharapkan pada tahun 2018 adalah :

1. Tersedianya Dokumen SOP Yang Berstandar ISO 9001-2015 = 1 Dokumen
2. Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga = 100%
3. Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP = 98%
4. Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran = 95%
5. Penerbitan akte kematian = 75%.
6. Jumlah KK yang telah dimuktahirkan datanya = 3000 KK
7. Berkurangnya jumlah data ganda = 1800 data
8. Berkurangnya Jumlah data anomali = 200 data
9. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan = 5 OPD

Hasil capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tahun 2017 serta rencana capaian kinerja pelayanan tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional (tahun)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian (%)	Proyeksi (angka)		OPD (Penanggung jawab)	
			Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)		Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Sasaran :</b>										
<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan</b>										
1	Tersedianya Dokumen SOP yang bersandar ISO 9001-2008		0	1 dokumen	1 sertifikat	0	60,100,000	60,300,000	Bidang Plak	
<b>Sasaran:</b>										
<b>Meningkatkan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akurasi data kependudukan</b>										
1	Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	2016 100%	97%	98%	100%	96.52%			Bidang Pelayanan adminduk	
2	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	869,096,000	1,006,011,000		
<b>Sasaran:</b>										
<b>Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian serta akurasi data catatan sipil</b>										
1	Persentase Penduduk (0 – 18 ) yang memiliki Akta Kelahiran	2020 90%	85%	95%	100%	94.73%			Bidang Pelayanan adminduk	
2	Persentase Penerbitan Akta Kematian	70%	85%	75%	80%	100%	224,286,000	330,068,000		
<b>Sasaran:</b>										
<b>Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan</b>										
1	Persentase Jumlah KK yang telah dimutakhirkan datanya		3600	3000	1000	3.682			Bidang Plak	
<b>Sasaran:</b>										
<b>Berkurangnya jumlah data ganda dan anomali (diragukan)</b>										
1	Jumlah data ganda		5000	1,800	800	5.833			Bidang Plak	
2	Jumlah data anomali		600	200	100	629				
<b>Sasaran:</b>										
<b>Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan</b>										
1	Persentase Jumlah OPD yang memanfaatkan data Kependudukan		5	5	5	5			Bidang Plak	
<b>Jumlah ...</b>										
							1,153,481,000	1,395,369,000		



### 2.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan SIAK dalam penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum dinamisnya data kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Konsistensi data belum terjaga dengan baik
4. Belum semua masyarakat menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terutama dokumen akte kematian.
5. Kurang lancarnya koordinasi dengan instansi terkait.
6. Masih adanya penerbitan akta kelahiran terlambat dan terlambat sekali.
7. Belum semua masyarakat memahami dan menyadari pentingnya konsistensi data diri dalam setiap pengurusan dokumen kependudukan.
8. Belum semua penduduk dibawah usia 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak.

Dalam skala nasional, isu-isu penting bidang kependudukan diantaranya ;

1. Potensi bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2030. Salah persiapan hanya akan membuang peluang dan berbalik menjadi ancaman. Jumlah angkatan kerja produktif justru bisa menjadi beban bagi pembangunan (*demographic disaster*).
2. Pembangunan Kependudukan dan KB.  
Beberapa program pembangunan kependudukan diantaranya ;
  - a. peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
  - b. pengarahan dan penataan persebaran penduduk
  - c. penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan
  - d. kegiatan pembangunan berbasis bukti.
3. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif sehingga

penyandang cacat dan lansia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

4. Pemanfaatan SIAK.

- a. Perbedaan data kependudukan masih menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan pembangunan, sehingga sistem informasi kependudukan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan data dan informasi yang solid untuk kepentingan pembangunan.
- b. Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan yang boleh disebarluaskan kepada publik dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan adalah Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung dengan Data Center Kemendagri dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kemendagri.

5. Inovasi Pelayanan Publik

RPJM Nasional 2014-2019 mengamanatkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten dan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi, maka inovasi baru dalam pelayanan publik harus terus dilakukan oleh OPD penyelenggara pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan semakin tinggi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan juga meningkat.

6. Kartu Identitas Anak

Setiap warga Negara wajib memiliki identitas, namun selama ini pemberian identitas kependudukan baru diberikan kepada penduduk usia 17 tahun dan/atau telah menikah dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu akan segera diterbitkan kartu identitas untuk penduduk dibawah 17 tahun berupa penerbitan Kartu Identitas Anak.



Selain hal tersebut, kelemahan dan tantangan juga masih ada dan masih membutuhkan perhatian seperti :

1. Keterbatasan aparatur yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Keterbatasan sarana kerja seperti tempat pelayanan, ruang konseling dan sarana kantor
3. Meningkatnya kebutuhan data kependudukan oleh institusi lain
4. Adanya tuntutan *update* data kependudukan
5. Dokumentasi hasil pelayanan administrasi kependudukan dan capil masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan ketersediaan ruangan yang terus bertambah.

Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto juga memiliki kekuatan dan peluang untuk peningkatan pelayanan SKPD antara lain ;

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Mulai tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data tunggal penduduk yang mulai dimanfaatkan oleh institusi lain.

Keterkaitan isu-isu dan masalah mendesak dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.  
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Tahun 2018  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

NO	KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK			KETERANGAN
	NASIONAL	PROPINSI	KOTA	
1	Peningkatan Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada	Peningkatan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Peningkatan kualitas aparatur, sistem pelayanan dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan	
2	Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAD) untuk pelayanan KTP-el didaerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.	Peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian	Peningkatan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
3	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.	Peningkatan Jumlah OPD yang memanfaatkan data	Peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian	
4	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil		Berkurangnya jumlah data ganda dan anomali	
5	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk		Peningkatan Jumlah KK yang telah dimutakhirkan datanya	
6	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil		Peningkatan Jumlah OPD yang memanfaatkan data Kependudukan	
7	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan			
8	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas			
	dilindungi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil			



#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

##### 2.4.1. Perbandingan rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Dalam Rencana Kerja (Renja) awal Tahun 2017 terdapat 6 Rencana Program dan 31 Kegiatan dengan total anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.495.727.675,- (khusus belanja langsung), sementara itu yang tertampung di DPA 2017 sebanyak 6 Program dan 31 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.711.386.157,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.248.809.157,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.462.577.000,-.

Setelah perubahan anggaran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 4.201.469.912,- (Empat milyar dua ratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) untuk membiayai 5 program dan 28 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

♦ Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.020.030.252,-
♦ Belanja Langsung	Rp. 2.181.439.660,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 4.201.469.912,-</b>

Khusus untuk anggaran belanja langsung, perbandingan anggaran pada RKPD 2017 dengan DPA tahun 2017 adalah sebagai berikut :

##### a. Perbandingan RKPD 2017 dengan DPA awal 2017

Nilai DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 sebesar Rp. 2.462.577.000,- atau 98,67% dibandingkan dengan rencana awal RKPD 2017 yang sebesar Rp. 2.495.727.675,-.

##### b. Perbandingan RKPD 2017 dengan DPA Perubahan 2017.

Pada perubahan APBD, anggaran tersebut menjadi Rp. 2.181.439.660,- atau 87,41% dari RKPD 2017.

c. Perbandingan DPA Awal 2017 dan DPA Perubahan 2017.

Selanjutnya jika dilihat perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan, maka terjadi penurunan anggaran setelah perubahan dimana sebelum perubahan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.462.577.000,- bertambah menjadi Rp. 2.181.439.660,- (terjadi penurunan sebesar Rp. 281.137.340,-).

2.3.1. Temuan dan catatan penting.

Beberapa kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja Tahun 2017 tidak terealisasi pada DPA OPD Tahun 2017, antara lain dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia yaitu kegiatan pengadaan pakaian dinas, fasilitasi/bantuan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan yang berhubungan dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama, pengadaan mobil pelayanan keliling serta kegiatan pemutakhiran data kependudukan.

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Pada Tahun 2018 disetiap kesempatan rapat evaluasi maupun pembinaan terhadap petugas registrasi penduduk desa/kelurahan dan kecamatan selalu dilakukan brainstorming guna mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petugas registrasi dan sekaligus dicarikan solusi pemecahan masalahnya dan pada awal tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto melakukan pertemuan khusus dengan stakeholder terkait guna membahas usulan program dan kegiatan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam dokumen usulan masyarakat.

Berikut Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 :



Tabel 3.1,  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	Kerjasama dengan Kantor Pajak Cabang Sawahlunto	Sawahlunto	Pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	Untuk memudahkan akses pembayaran pajak
2	Pengarsipan Digital	Sawahlunto	Jumlah dokumen yang diarsipkan	500 dokumen	Untuk memudahkan pencarian arsip

Usulan dari pemangku kepentingan kegiatan pengarsipan digital akan di tindaklanjuti dengan menganggarkan pada kegiatan tahun 2019, sedangkan usulan kerjasama dengan kantor pajak cabang Sawahlunto untuk pemanfaatan data akan ditindaklanjuti pada tahun 2018 melalui penandatanganan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dengan Kantor Pajak Cabang Sawahlunto.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

---

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat nasional berada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak terlepas dari kebijakan, program dan kegiatan prioritas tingkat nasional. Secara rinci kami paparkan visi, misi, kebijakan serta program prioritas bidang kependudukan dan pencatatan sipil tingkat nasional dimulai dari kementerian dalam negeri dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Nasional, Renstra Kemendagri dan Renstra Ditjen Dukcapil.

Ditingkat kementerian dalam negeri, bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi program prioritas diantaranya pada prioritas ke-3 yaitu Penataan Administrasi Kependudukan (P3) yang seluruh kegiatannya berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, prioritas ke-12 yaitu Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (P12) dan prioritas ke-13 yaitu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P13).

Kegiatan yang dilaksanakan pada program prioritas ke-3 adalah ;

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
6. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta
7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Pada program prioritas ke-12, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan adalah kegiatan ke-3 yaitu penelitian dan



pengembangan bidang PUM dan Kependudukan.

Sementara itu, pada program prioritas ke-13 terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan kependudukan dan keuangan daerah.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-944 DUKCAPIL TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015-2019, ditetapkan visi "Terwujudnya database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan mendukung penegakkan hukum dan demokrasi."

Makna dari visi itu adalah ;

a. Database kependudukan nasional yang akurat

Bahwa pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota sebagai dasar terwujudnya database kependudukan nasional berjalan dengan benar, sehingga diperoleh data kependudukan yang akurat dan dengan cepat secara online terhubung dengan database kependudukan nasional.

b. Penerbitan dokumen kependudukan

Bahwa pemerintah harus menerbitkan dokumen kependudukan baik dokumen pendaftaran penduduk maupun dokumen pencatatan sipil sebagai identitas diri dari penduduk.

c. Perlindungan kepada masyarakat

Bahwa dokumen kependudukan adalah wujud pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

d. Peningkatan pelayanan publik

Bahwa database kependudukan digunakan sebagai informasi dan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

e. Penegakan hukum dan demokrasi

Bahwa data kependudukan nasional memiliki peran strategis dalam upaya mendukung penegakan hukum serta mendukung pemilu dan pemilukada sebagai penjabaran tegaknya demokrasi.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dengan memperkuat sumber daya manusia di bidang administrasi kependudukan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik, bersih dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Mewujudkan perlindungan dan rasa aman kepada setiap penduduk dengan memiliki dokumen kependudukan.
4. Menjadikan data kependudukan menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya, pelayanan public dan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan nasional, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil kepada kementerian/lembaga.

Tujuan yang hendak dicapai dari misi itu adalah ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna.
5. Mewujudkan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat dengan memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan meningkatkan kualitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil daerah.
7. Mewujudkan galeri kependudukan sebagai sarana informasi dan pendidikan administrasi kependudukan.

Untuk mendukung tujuan strategis, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua



kabupaten/kota.

2. Tersedianya database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan criminal.
3. Meningkatnya sumber daya manusia di bidang administrasi kependudukan baik pusat maupun daerah.
4. Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna pusat.
5. Terwujudnya perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.
7. Terwujudnya galeri kependudukan sebagai sarana informasi dan pendidikan administrasi kependudukan.

Arah kebijakan dan strategi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

1. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, melalui strategi :
  - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM
  - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah.
  - c. Penerapan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar dan 8 urusan pilihan.
2. Mendorong terwujudnya pelayanan public yang baik di daerah, melalui strategi ;
  - a. Penerapan kebijakan pelayanan public di daerah
  - b. Penguatan kelembagaan PTSP di daerah
3. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional melalui strategi ;
  - a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat
  - b. Pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP elektronik secara nyata

- dalam pelayanan public, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan
  - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri melalui strategi ;
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
  - c. Penyediaan system informasi yang terintegrasi
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan public
  - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Program Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015-2019 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 7 kegiatan strategis yaitu :

1. Pengembangan system administrasi kependudukan (SAK) terpadu.
2. Pengelolaan informasi kependudukan
3. Pembinaan administrasi pendaftaran penduduk
4. Pembinaan administrasi pencatatan sipil
5. Pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri sub bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Cakupan penerbitan KK 100 % pada tahun 2015
2. Cakupan penerbitan KTP 100 % pada tahun 2015
3. Cakupan penerbitan Akte Kelahiran 90 % pada tahun 2020 dan
4. Cakupan penerbitan Akte Kematian 70 % pada tahun 2020.



Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Terpilih Tahun 2010-2015, bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi misi ke-2 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional melalui program pengembangan sistem administrasi kependudukan (Program ke-4). Sedangkan visi DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENUJU SUMATERA BARAT SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran DPPKBKPS, misi DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana serta pengendalian kuantitas penduduk
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Mewujudkan peningkatan kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan

Sementara itu visi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2020 adalah **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”** Sedangkan Visi Kota Sawahlunto untuk periode lima tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani”** dengan misi yang diemban yaitu :

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal
2. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
3. Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkarakter
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien.
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah
7. Memperluas jaringan sosial, ekonomi sedara nasional dan internasional.

Selanjutnya Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tahun 2013 – 2018 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan program strategis nasional bidang kependudukan serta pencapaian visi pemerintah Kota Sawahlunto yang telah pula dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 adalah “ Menjadi Pelayan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat, Cepat dan Dinamis”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan akurasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari informasi diatas, maka visi, misi dan program strategis yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak terlepas dari kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2019 adalah :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahun yang akan datang guna menindaklanjuti program dan kegiatan tahun sebelumnya
2. Merancang program dan kegiatan baru berdasarkan permasalahan atau isu strategis yang ditemui pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.



### 3.3. Program Dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, pada tahun 2019 telah direncanakan sebanyak 6 Program dan 35 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.913.995.800, (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah). Program-program dan Kegiatan Prioritas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto di tahun 2019 sebagaimana daftar rincian terlampir pada tabel 4.

Tabel 4

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Urusan Pemerintahan : 1.10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Sawahlunto		865,336,800	APBD			957,820,230
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Adm Perkantoran terlaksana dengan baik (bulan)							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000 yang disediakan (buah)		220	4,800,000	APBD		300	4,800,000
		Jumlah materai 3000 yang disediakan (buah)		400				500	
		Jml pemakaian jasa pos (bulan)		12				12	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah tagihan listrik, air, telepon dan internet yang dibayar (bulan)		12	88,800,000	APBD		12	97,680,000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	bahan dan alat kebersihan yang disediakan (bulan)		12	9,560,000	APBD		12	10,516,000
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli (bulan)		12	42,493,300	APBD		12	46,742,630
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang disediakan (bulan)		12	21,427,500	APBD		12	30,000,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralatan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (bulan)		12	4,750,000	APBD		12	5,225,000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU	Jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang disediakan (jenis)		5	4,050,000	APBD		5	4,455,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia (bulan)		12	31,742,000	APBD		12	34,916,200
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan)		12	137,670,000	APBD		12	151,437,000
10	Penyediaan jasa pelayanan pegawai Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan jasanya (orang)		17	322,270,000	APBD		7	354,497,000
11	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya (orang)		12	143,400,000	APBD		12	157,740,000
12	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Jumlah spanduk yang disediakan (buah)		10	24,874,000	APBD		10	27,361,400
		Jumlah bendera yang disediakan (buah)		4				4	
		Jumlah karangan bunga yg disediakan (bh)		0				0	
		marawa		12				12	
		umbul2		-				-	
		ballho (m)		58				58	
		standing banner		-				-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
		DUK/Bezetting papan struktur		1				1		
		Jumlah iklan radio yang disiarkan (kali)		-				-		
		Papan Informasi (acrylic)		-				-		
		bingkai foto		-				-		
13	Forum Administrasi Dukcapil	frekwensi pelaksanaan (keg)	Sawahlunto	2	29,500,000	APISD		2	32,450,000	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Sawahlunto	12	1,221,412,800	APISD		12	407,454,080	
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah printer yang dibeli (unit)	Sawahlunto	1	134,000,000	APISD		3	25,300,000	
		Jumlah AC yang dibeli (unit)		-				-		
		Jumlah laptop yang dibeli (unit)		1				1		
		Jumlah kursi staf yg dibeli (bh)		10				-		
		Jumlah komputer yg dibeli (bh)		-				-		
		Jumlah meja staf yg dibeli (bh)		-				-		
		Jumlah mesin tik yg dibeli (bh)		-				-		
		Jumlah meja bundar yang dibeli (set)		2				-		
		Jumlah kursi eselon 3		3				-		
		Jumlah kursi eselon 2		1				-		
		Jumlah kursi eselon 4		6				-		
		Mesin penghancur kertas		1				-		
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah frekwensi pemeliharaan bangunan (bulan)	Sawahlunto	12	44,750,000	APISD		12	49,225,000	
		Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan)		12				12		
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit)	Sawahlunto	5	135,262,800	APBD		5	148,789,080	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit)		9				9		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	Sawahlunto	10	24,650,000	APBD		7	27,115,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala meubllair	Jumlah meubllair yang dipelihara (jenis)	Sawahlunto	3	7,750,000	APBD		2	8,525,000	
6	Pengadaan alat angkut darat bermotor	Jumlah mobil dan motor pelayanan kelling yang beli (unit)	Sawahlunto	3	740,000,000	APBD		0	-	
7	Rehab sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab bangunan dan pagar	Sawahlunto	1	135,000,000	APBD		1	148,500,000	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Moju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1		3	4	5	6	7	9	8	10	
		DUK/Bezetting papan struktur		1			1			
		Jumlah iklan radio yang disiarkan (kali)		-			-			
		Papan Informasi (achlync)		-			-			
		bingkal foto		-			-			
13	Forum Administrasi Dukcapil	frekwensi pelaksanaan (keg)	Sawahlunto	2	29,500,000	APBD	2		32,450,000	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Sawahlunto	12	1,221,412,800	APBD	12		407,454,080	
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah printer yang dibeli (unit)	Sawahlunto	1	134,000,000	APBD	3		25,300,000	
		Jumlah AC yang dibeli (unit)		-			-			
		Jumlah laptop yang dibeli (unit)		1			1			
		Jumlah kursi staf yg dibeli (bh)		10			-			
		Jumlah komputer yg dibeli (bh)		-			-			
		Jumlah meja staf yg dibeli (bh)		-			-			
		Jumlah mesin tik yg dibeli (bh)		-			-			
		Jumlah meja bundar yang dibeli (set)		2			-			
		Jumlah kursi eselon 3		3			-			
		Jumlah kursi eselon 2		1			-			
		Jumlah kursi eselon 4		6			-			
		Mesin penghancur kertas		1			-			
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah frekwensi pemeliharaan bangunan (bulan)	Sawahlunto	12	44,750,000	APBD	12		49,225,000	
		Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan)		12			12			
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit)	Sawahlunto	5	135,262,800	APBD	5		148,789,080	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara (unit)		9		APBD 24/3-19	9			
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	Sawahlunto	10	24,650,000	APBD	7		27,115,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala meubillair	Jumlah meubillair yang dipelihara (jenis)	Sawahlunto	3	7,750,000	APBD	2		8,525,000	
6	Pengadaan alat angkut darat bermotor	Jumlah mobil dan motor pelayanan keliling yang beli (unit)	Sawahlunto	3	740,000,000	APBD	0			
7	Rehab sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab bangunan dan pagar	Sawahlunto	1	135,000,000	APBD	1		148,500,000	

  
 29/3-18



Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1		3	4	5	6	7	9	8	9	10
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan adm. Kependudukan dan capil (%)		45	250,000,000	APBD	45		45	275,000,000
1	Pendidikan dan latihan formal	Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang)	Dalam dan Luar Provinsi	25	100,000,000	APBD	15		15	110,000,000
2	Capacity Building Petugas Pelayanan Dukcapil	Jml aparatur yang mengikuti Capacity Building (orang)	Dalam Provinsi	42	150,000,000	APBD	42		42	165,000,000
D.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kedisiplinan dalam berpakaian (%)		100	25,000,000	APBD	100		100	27,500,000
1	Pengadaan Pakalan Khusus/ Tertentu Pegawai	Jumlah pakalan trasional yang diadakan (m)	Dinas Kencapil	100	25,000,000	APBD	50		50	27,500,000
E.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)	Sawahlunto	96.52	1,119,366,000	APBD	97.52		97.52	1,225,802,600
		Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)		100			100		100	
1	Pengelolaan SIAK	Jumlah cetak buku Profil Kependudukan (Buku)	Sawahlunto	25	41,000,000	APBD	25		25	39,600,000
		Jumlah cetak buku Data Agregat Kependudukan (buku)		150			150		150	
		Jumlah pemeliharaan perangkat mesin (paket)		1			1		1	
		Jumlah KK yang ter Update (KK)		4,000			4,000		4,000	
2	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan (dokumen)	Sawahlunto	15,000	186,250,000	APBD	15,000		15,000	204,875,000
3	Gerakan Sawahlunto Sadar Administrasi Kependudukan (GESSA)	Jumlah Frekwensi Pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan GESSA	Sawahlunto	4	150,000,000	APBD	4		4	165,000,000
4	Pengembangan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan secara on line	Jumlah sistem yang dibangun (aplikasi)	Sawahlunto	1	55,200,000	APBD	1		1	60,720,000
5	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan)	Sawahlunto	15	325,916,000	APBD	15		15	358,507,600
6	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional SIAK	Jumlah peralatan SIAK yang diadakan (Paket)	Sawahlunto	1	311,000,000	APBD	1		1	342,100,000
7	Inovasi Pelayanan Kependudukan	Jumlah Inovasi (inovasi)	Sawahlunto	1	50,000,000	APBD	1		1	55,000,000
F.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Penduduk (0-18) yang memiliki Akta Kelahiran (%)	Sawahlunto	95	459,283,000	APBD	95		95	505,211,300
		Penerbitan Akta Kematian (%)	Sawahlunto	75			75		75	
1	Pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran (dokumen)	Sawahlunto	3,000	109,940,000	APBD	3,000		3,000	120,934,000
		Jumlah penerbitan akta kematian (dokumen)		300			300		300	
		Jumlah pelayanan KK (dokumen)		3,000			3,000		3,000	

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pelayanan KTP (keping)		2,500				2,500	
		Jumlah surat pindah yang diterbitkan (dokumen)		500				500	
2	Pelayanan dokumen kependudukan	Jumlah laporan pelayanan keilling (laporan)	Sawahlunto	20	78,825,000	APBD		20	86,707,500
3	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Capil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)	Sawahlunto	500	118,490,000	APBD		500	130,339,000
4	Fasilitasi Petugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan	Jumlah petugas yang difasilitasi (orang)	Sawahlunto	37	67,128,000	APBD		37	73,840,800
5	Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak	Jumlah Penerbitan KIA (Dokumen)	Sawahlunto	5,000	84,900,000	APBD		5,000	93,390,000
6	Program Penguatan Kelembagaan	Terpenuhi pelayan sesuai standar ISO 9001 : 2015	Sawahlunto	100	60,300,000	APBD		100	91,330,000
1	Sertifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001:2015)	Keluarnya sertifikat (ISO 9001 : 2015)(Paket)	Sawahlunto	1	60,300,000	APBD		1	66,330,000
2	Audit Eksternal sertifikasi ISO (9001 : 2015)	Laporan Hasil Audit eksternal (laporan)	Sawahlunto			APBD		1	25,000,000
		TOTAL ....			4,000,698,600				3,490,118,210

Sawahlunto, 5 Maret 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Sawahlunto,

Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si

NIP. 19670404 199403 2 008



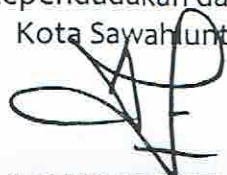
**BAB IV  
PENUTUP**

---

\* Demikianlah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2019 ini disusun sebagai suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sawahlunto,     Maret 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Sawahlunto,



**Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si**

NIP. 19670404 199403 2 008